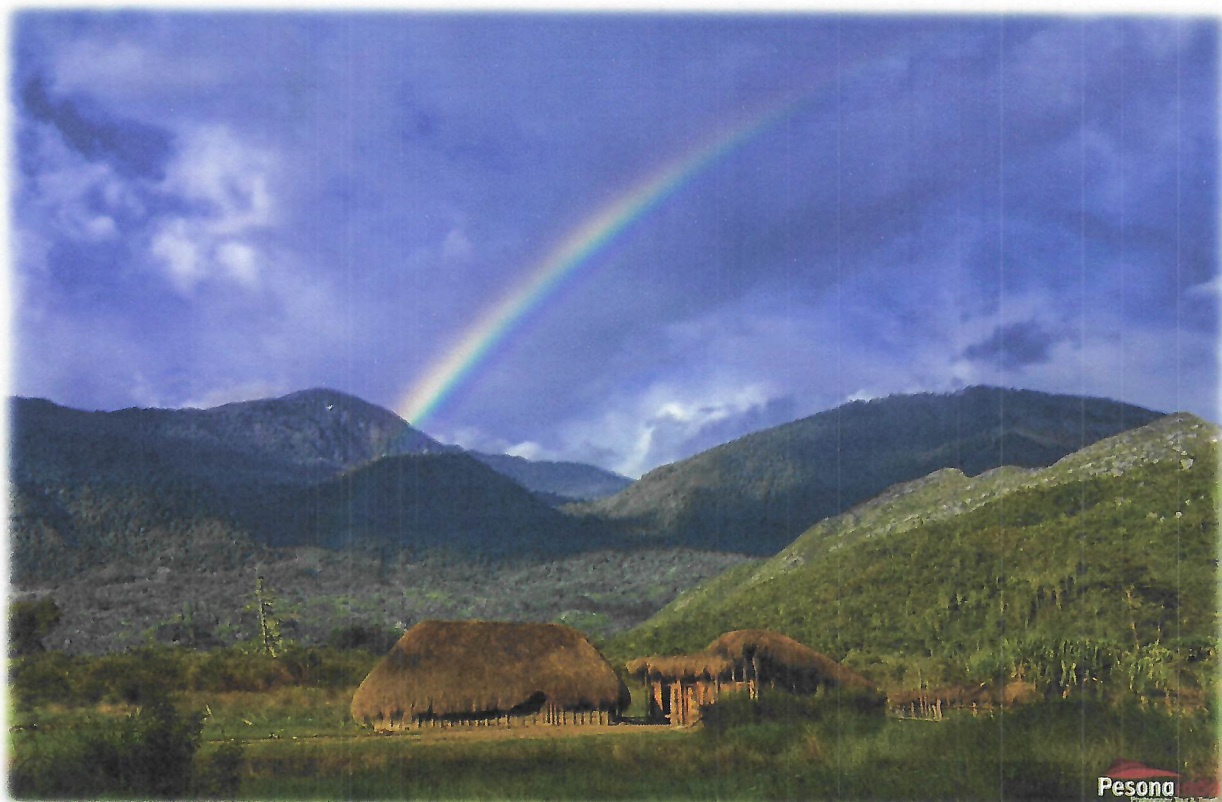




LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN JUNI TAHUN 2025



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak, S.H., M.H
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo, S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S., Sos., M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan.....	18
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si.....	18
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd).....	26
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M).....	27
BAB III PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

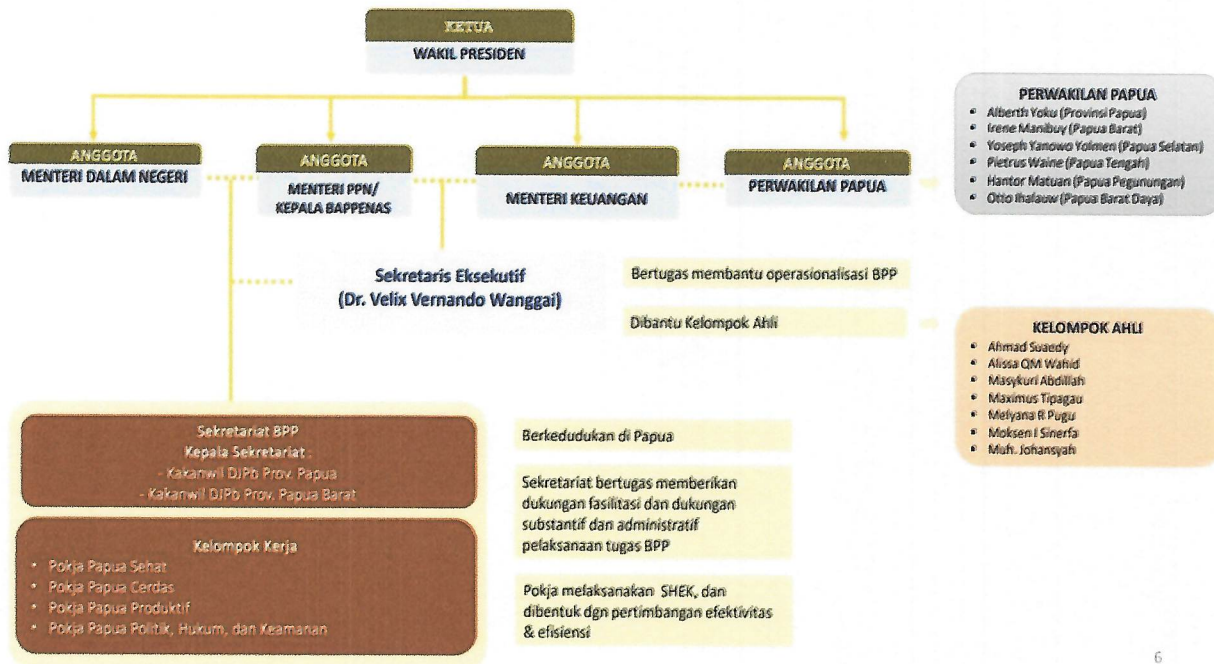
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

- Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya per Bulan Juni tahun 2025 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan, S.IP.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan bersama Tokoh Masyarakat Kampung mengenai masalah keamanan dan ketertiban di Kota Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025, bertempat di Kantor Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pertemuan sekaligus Sosialisasi mengenai Keamanan dan Ketertiban Kota Wamena Pasca Penembakan Anggota Polres Jayawijaya di RSUD Wamena bersama 9 Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Intelektual Distrik Napua, sebagai tindak lanjut dari himbauan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor: 0001.10.2/1867/BUB.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Kepala desa dan aparat kampung 9 Distrik Napua, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dari 9 Kampung Distrik Napua.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Hasil pertemuan membahas situasi keamanan pasca peristiwa penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya yang terjadi di RSUD Wamena disepakati bahwa Kepala Distrik Napua dan 9 Kepala Kampung beserta Peserta rapat yang hadir berkomitmen akan menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masing-masing kampung di Napua, dan akan memastikan jika terdapat masyarakat penduduk yang baru masuk di area 9 Kampung Distrik Napua maka akan dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk hal ini bertujuan agar masyarakat Distrik Napua tetap merasa aman dan nyaman.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Rapat Kerja Ke-III Klasis Baliem Tengah Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 27 Juni 2025, bertempat di Jemaat Bethel Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Dalam rangka mengikuti sekaligus mengambil bagian sebagai penasehat gereja dalam Rapat Kerja ke-III Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Klasis Baliem Tengah Tahun 2025
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Badan Pengurus Harian Klasis Baliem Tengah, Hambah-hambah Tuhan dan Pengurus Gereja, Kader Intelektual, Kaum Profesi dan Peserta Raker Ke-III Umat Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Klasis Baliem Tengah 32 Jemaat.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Rapat Kerja ke-III Klasis Baliem Tengah Tahun 2025 berjalan baik sesuai dengan jadwal panitia Pelaksana, dengan hasil sebagai berikut: 1. Telah terjadi evaluasi Pelayanan Tahun 2024/2025. 2. Menyusun program pelayanan tahun 2025/2026. 3. Terbentuknya panitia Konfrensi gereja kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Tahun 2026.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Anggota BP3OKP Setanah Papua dengan Menteri HAM Republik Indonesia.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025, bertempat di Kantor Kementerian HAM RI Jakarta.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaporkan situasi keamanan secara umum di 6 Provinsi Papua Raya, terlebih khususnya di Papua Pegunungan pasca penembakan anggota Polres Jayawijaya di RSUD Wamena dan Keadaan Pengungsi dari Kabupaten Nduga yang ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	6 Anggota BP3OKP se Tanah Papua, Menteri HAM Republik Indonesia, Staff Ahli Menteri HAM Repunlik Indonesia.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan pertemuan dalam rangka menyampaikan situasi keamanan dan ketertiban di Tanah Papua oleh 6 Anggota BP3OKP perwakilan dari masing-masing 6 Provinsi diterima dengan baik oleh Menteri HAM

		1. Menyerahkan hasil Keputusan Gubernur 6 Provinsi Papua Raya dan Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). 2. Perlu ada pengambilan data yang akurat tentang pengungsi dari Kabuten Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan antara 6 Anggota BP3OP Se Tanah Papua Bersama SETWAPRES RI
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, bertempat di Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI Jakarta.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas proses perkembangan anggota Pokja yang baru di usulkan oleh Anggota BP3OKP di 4 DOB.
Peserta Kegiatan	:	Bapak. Afif., ASTEP SETWAPRES RI bersama 6 Anggota BP3OKP Provinsi Papua
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP

Hasil Kegiatan	:	Pertemuan yang berlangsung berjalan dengan di hadiri oleh Bapak Afif dari Setwapres RI bersama dengan seluruh Anggota BPP 6 Provinsi Papua namun karena aka nada pergantian maka seluruh usulan yang dibawa oleh masing-masing anggota BPP akan di tindak lanjuti setelah proses peralihan jabatan Deputy III SETWAPRES yang baru.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan 6 Anggota BP3OP Se Tanah Papua Bersama WAMENDAGRI RI Ibu Ribka Haluk
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Wakil Menteri Dalam Negeri I Gedung A Lantai 1 Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan pertemuan ini dalam rangka membahas isu-isu strategis perkembangan implementasi otonomi khusus di Papua bersama WAMENDAGRI RI dan 6 Anggota BP3OKP se tanah Papua
Peserta Kegiatan	:	1. Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,M.M 2. Wakil Menteri Dalam Negeri RI 3. Dr. Al Muktabar, M.Sc. 4. Sekretaris Eksekutif BPP 5. Staff Sekretariat WAMENDAGRI RI 6. 6 Anggota BP3OKP se Papua
Tugas dan Fungsi Kegiatan	:	SHEK

yang di laksanakan	
Misi/Keterangan	: BP3OKP
Hasil Kegiatan	: 1. Membahas tata kelola dana OTSUS, telah di lakukan interoperabilitas antara SIPD (KEMENDAGRI), SIKD (KEMENKEU), dan SIPP (BAPPENAS) dalam rangka optimalisasi percepatan perbaikan tata kelola dana OTSUS. Ini juga sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk selanjutnya, KEMENDAGRI akan melakukan pemberian pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah. 2. Melakukan penguatan tugas dan fungsi BP3OKP, KEMENDAGRI akan memberikan pendampingan dan supervise secara berkelanjutan. 3. Membangun kesepahaman bersama terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Implementasi Asta Cita di Tanah Papua perlu dilaksanakan forum koordinasi bersama yang melibatkan pemerintah pusat, BP3OKP, Gubernur, Bupati / Wali Kota, MRP, DPRP/DPRK, dan pemangku kepentingan lainnya. Agenda dimaksud disarankan dilaksanakan di Wilayah Papua dan akan dilaporkan lebih lanjut kepada Bapak Wakil Presiden RI dan Bapak Menteri Dalam Negeri RI. 4. KEMENDAGRI sebagai anggota BP3OKP akan berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif BP3OKP Kantro Sekretariat Wakil Presiden RI untuk meminta waktu audiensi bersama Bapak Wakil Presiden RI selaku Ketua BP3OKP. 5. Penanda tangan kesepakatan dari Kesimpulan rapat/pertemuan Wakil Menteri Dalam Negeri dengan 6 Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Dokumentasi Kegiatan	: 



Kegiatan 6	
Nama Kegiatan	: Pertemuan antara Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bersama Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, bertempat di Ruang Kerja Deputy Pengawasan Kementerian Koperasi RI.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Dalam rangka pembahasan pendirian dan pengembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	: Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi RI bersama Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	: SHEK
Misi/Keterangan	: BP3OKP
Hasil Kegiatan	: Hasil Kegiatan pertemuan dalam rangka Pembahasan pendirian dan pengembangan Koperasi Merah Putih dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dari pihak Deputy Bidang Pengawasan menjelaskan syarat-syarat dan peraturan Koperasi Merah Putih oleh Deputy Bidang Pengawasan. 2. Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan akan mengkoordinasi ke Dinas Terkait dalam hal ini ke Dinas PERINDAKOP dan Dinas Pemberdayaan Kampung/Desa (DPMK) Provinsi Papua Pegunungan.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	---

Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama Pendaftar CPNS Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, bertempat di Aula Kantor KPPN Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan dari para pendaftar CPNS Provinsi Papua Pegunungan Formasi 2024
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama Perwakilan HILABEWA.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Dalam pertemuan ini perwakilan HILABEWA menjelaskan kuota atau jatah OTSUS 80% diperuntukan Orang Asli Papua (OAP) dan 20% diperuntukan buat non-OAP namun lahir besar di Wamena/ Papua Pegunungan namun dalam tahapan penetapan hasil SKD CASN tidak ada anak-anak asli Papua Pegunungan yang lulus maka dalam situasi seperti ini harus ada kebijakan dari Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk memperhatikan hak-hak anak-anak asli Papua Pegunungan, maka pada kesempatan ini Bapak Hantor Matuan selaku Badan Pengarah akan mengawal permasalahan ini baik di tingkat Kabupaten dan pusat untuk memastikan hak-hak anak-anak asli Papua dapat mereka terima.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 8		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi bersama RRI Wamena mengenai Kerjasama dalam peliputan kegiatan BPP.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025, bertempat di Ruang kerja Kepala Kantor RRI Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi mengenai tugas dan Fungsi BPP Provinsi Papua Pegunungan dan meminta RRI dapat bekerjasama dalam meliput setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPP
Peserta Kegiatan	:	Kepala Kantor RRI Wamena, Anggota BPP Papua Pegunungan didampingi Pokja Papua Sehat dan Staff serta Sekretariat DOB KPPN Wamena
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Kepala Kantor RRI Wamena bersedia dan akan bersama-sama dengan BPP untuk menyiarkan seluruh kegiatan yang perlu untuk diliput, dan menugaskan staff RRI untuk berkomunikasi bersama

		Staff BPP mengenai biaya, prosedur dan kegiatan yang akan melibatkan RRI untuk peliputannya
Dokumentasi Kegiatan	:	 

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Fransiscus Elosak, S.H.,M.H

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	NIHIL
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	
Dokumentasi Kegiatan	:	

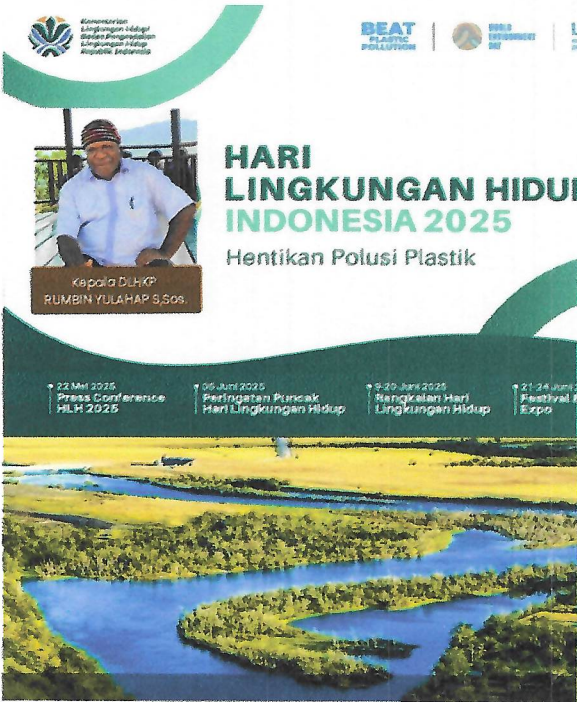
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S.Sos.,M.Si

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Audiensi Pokja Papua Produktif bersama Kadis DISPORA PAREKRAF Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025, bertempat di ruang kerja BPP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Audiensi antara Pokja Papua Produktif Bersama Kepala Dinas DISPORA PAREKRAF Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	1. Yoyo Iwik, S.Sos.,M.Si., Pokja Papua Produktif. 2. Hantor Matuan, S.IP., Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan. 3. Timotius Matuan, S.Pd.,M.Pd., Kepala Dinas DISPORA PAREKRAF Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif

Hasil Kegiatan	:	Kegiatan pertemuan antara Anggota BPP Pokja Papua Produktif dan Kepala Dinas berserta Kepala Bidang DISPORA PAREKRAF Provinsi Papua Pegunungan berjalan baik dan ada beberapa rencana yang telah di sepakati antara lain: 1. BPP Pokja Papua Produktik dan Dinas Dispora Parekraf Provinsi Papua Pegunungan bersinergi dalam membangun Ekonomi Kreatif di 8 Kabupaten. 2. Akan mengkoordinasikan ke Dinas Dispora Parekraf di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka mendata Kegiatan Ekonomi Kreatif yang sedang berjalan. 3. Masing-masing dari 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan perlu membentuk Kegiatan Ekonomi Kreatif.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Hasil Pertemuan Antara Pokja Papua Produktif Bersama Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2025, bertempat di Kantor Ruang Kerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pertemuan antara Pokja Papua Produktif Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka Program Penghijauan Penanaman Hutan Produktif.
Peserta Kegiatan	:	1. Yoyo Iwik, S.Sos.,M.Sl., Anggota Pokja Papua Produktif. 2. Rumbin Yulahap, S.Sos., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pegunungan. 3. Roby Kogoya., Kepala Bidang Penghijauan Penanaman Hutan Produktif.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif

Hasil Kegiatan	:	Kegiatan pertemuan antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. PP dan Anggota BPP Pokja Papua Produktif berjalan baik dan telah merencanakan untuk Penghijauan Penanaman Hutan Produktif dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional Indonesia Tahun 2025.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Antara Pokja Papua Produktif Bersama perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2025, bertempat di Cafe Hotel Anggrek Wamena.

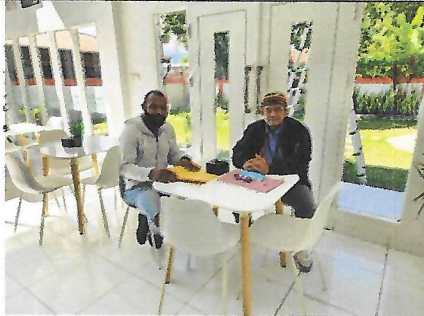
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pertemuan antara Pokja Papua Produktif Bersama ketua HMPJ Kaupaten Jayawijaya beserta beberapa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	1. Yoyo Iwik, S.Sos.,M.SI., Anggota Pokja Papua Produktif. 2. Ketua HMPJ Kab. Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. 3. Ketua-ketua BEM Kab. Jayawijaya Prov. Papua Pegunungan. 4. Beberapa Perwakilan Mahasiswa Kab. Jayawijaya Prov. Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi.
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan pertemuan Anggota BPP Pokja Papua Produktif bersama Ketua HMPJ Kabupaten Jayawijaya dan Ketua-ketua BEM Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menghasilkan beberapa gagasan antara lain: 1. Mahasiswa di wilayah Papua Pegunungan berkomitmen untuk memulai usaha di bidang barang dan jasa sesuai dengan talenta dan passion mereka. 2. Akan memulai bergerak merintis dan membangun usaha koperasi kampus.
Dokumentasi Kegiatan	:	



Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan dan Audiensi Antara Pokja Papua Produktif, Ketum KONI Provinsi Papua Pegunungan, bersama SEKDA Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, bertempat di Kantor KONI Provinsi Papua Pegunungan dan Ruang Kerja SEKDA Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pertemuan sekaligus Audiensi antara Ketua Umum KONI bersama Pokja Papua Produktif Provinsi Papua Pegunungan dan SEKDA Provinsi Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	1. Antonius Wetipo, SE.,M.SI., Ketua KONI Prov. Papua Pegunungan. 2. Yoyo Iwik, S.Sos.,M.SI., Anggota Pokja Papua Produktif. 3. Drs. Wasuok Demianus Siep., SEKDA Prov. Papua Pegunungan. 4. Badan Pengurus Harian KONI Provinsi Papua Pegunungan. 5. Masing-masing cabang olahraga yang ada di KONI Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan pertemuan antara Badan Pengurus Harian KONI beserta Anggota BPP Pokja Papua Produktif dan SEKDA Provinsi Papua Pegunungan menghasilkan beberapa gagasan antara lain: 1. Ada salah satu Cabang Olahraga yang bermasalah dengan LPJ maka perlu di revisi kembali. 2. Hasil Pertemuan dan Audiensi di maksud telah diserahkan kepada SEKDA Prov. Papua Pegunungan di ruang kerjanya

Dokumentasi Kegiatan	:	 
----------------------	---	---

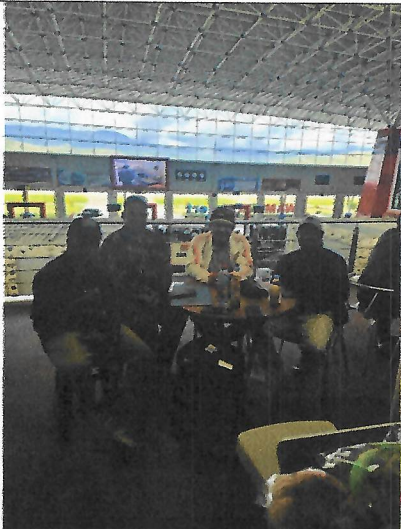
Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Dan Evaluasi pembuatan LPJ Cabor Paramotor yang mengalami keterlambatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2025, bertempat di Aula Hotel Anggrek
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Membahas penyelesaian LPJ bagi semua cabor yang mendapat bantuan dana operasional dari DISPORA Provinsi 2. Mendukung pemeriksaan BPK terhadap semua OPD di Provinsi
Peserta Kegiatan	:	Bendahara Cabor Dan Kadispora Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif

Hasil Kegiatan	:	1. Berkoordinasi kepada seluruh ketua dan bendahara cabor terutama paramotor agar lebih tertib administrasi maka LPJ harus segera diselesaikan. 2. Sinkronisasi dan koordinasi kepada seluruh cabor-cabor agar tetap mendukung terhadap pemeriksaan BPK agar kita tetap transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan cabor
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan audensi bersama DISPORA PAREKRAF Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2025, bertempat di Kantor Dinas Dispora Parekraf
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Membahas Program kerja RIPP dan RAPP masing-masing Kabid di Dispora Parekraf 2. Membahas anggaran program untuk kegiatan tahun 2025
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Produktif Provinsi Papua Pegunungan bersama Kadis dan Kabid Dispora Parekraf
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	1. Menjalankan peran dan fungsi Sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi terhadap program kerja dispora parekraf sesuai hasil musrembang Provinsi Papua Pegunungan 2. Evaluasi DPA yang sudah terbentuk tetapi dana yang tersedia di bank masih nihil.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Pembentukan pelaku usaha muda ekonomi kreatif kabupaten Lanny jaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 28 juni 2025, bertempat di cafe bandara
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Berkoordinasi dan Harmonisasi Dinas PAREKRAF, BAPPEDA, PERINDAGKOP dan PUPR agar bisa berkolaborasi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Lanny Jaya. 2. Evaluasi dana OTSUS yang sudah diprogramkan bisa tersalurkan sesuai program dan tepat sasaran terutama pelaku Ekonomi Kreatif.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Produktif BPP, Dinas Pariwisata, Pelaku Ekonomi Kreatif
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	1. Rencana akan dilakukan pembentukan pelaku usaha Ekonomi Kreatif bagi pemuda di Kabupaten Lanny Jaya 2. Penyaluran dana otsus dari dinas agar sesuai program dan tepat sasaran ke pelaku ekraf.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	---

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S.Pd)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Pokja Papua Cerdas dan Kedutaan Australia
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025, bertempat di Kantor Kedutaan Australia di Jakarta.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka mempresentasikan Program Pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan dengan Kedutaan Australia – Indonesia di Jakarta.
Peserta Kegiatan	:	1. Duta Besar Australia – Indonesia. 2. Dr. HC. John Tabo, S.E.,M.BA., Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. 3. Paul Wetipo, S.Pd.,M.Pd., Anggota BPP Pokja Papua Cerdas Provinsi Papua Pegunungan. 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan. 5. Kepala Dinas BAPPERINDA Provinsi Papua Pegunungan. 6. Staff kesekretariatan Duta Australia – Indonesia.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK

Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kedutaan Australia – Indonesia dalam rangka mempresentasikan Program Pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan berjalan baik dan lancar, maka akan dijadwalkan kembali pembahasan tindak lanjut lebih detail untuk menangani pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Partisipasi Pokja Papua Sehat BP3OKP dalam rangka Sosialisasi Program MBG yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2025, bertempat di ruang rapat SEKDA Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mengikuti Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Peserta Kegiatan	:	1. Anggota BPP POKJA Papua Sehat.

		2. SEKDA Provinsi Papua Pegunungan. 3. Asisten II Provinsi Papua Pegunungan. 4. Kepala OPD terkait dan Staf Provinsi Papua Pegunungan. 5. Tim Kerja MBG Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	1. Pembentukan Tim Kerja, Program Kerja dan Rencana aksi MBG tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan 8 Kabupaten melalui regulasi daerah. Maka, Dibutuhkan adanya tim kerja Pemerintah tingkat Provinsi dan 8 Kabupaten sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam kontrol dan pembinaan melalui regulasi Pemerintah Daerah. 2. Pendataan sasaran peserta MBG 8 Kabupaten dibutuhkan kajian dan pendataan yang akurat. Maka, Perlunya Pendataan sasaran secara akurat yang memberikan dampak. 3. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar dan stok bahan pangan di daerah sangat kurang. Maka, perlu adanya Peningkatan Produksi Bahan pangan lokal.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi BPP Pokja Papua Sehat dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025, bertempat di Gedung Otonom ruang kerjanya Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pertemuan dalam rangka koordinasi BPP Pokja Papua Sehat bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan Bapak Simon Sembor
Peserta Kegiatan	:	1. Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M., Anggota BPP POKJA Papua Sehat. 2. Simon Sambor Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Pertemuan Anggota BPP Pokja Papua Sehat dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka koordinasi dan audiensi sistem dan Prosedur pembiayaan Pemerintah Provinsi bagi Mahasiswa Program Studi Kedokteran ada beberapa kendala yang ditemukan, diantaranya sebagai berikut: 1. Belum ada pendataan yang valid kepastian jumlah Mahasiswa di tempat perkuliahandi dalam dan di luar negeri khususnya mahasiswa Jurusan Kedokteran. 2. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengadakan pendataan yang valid dan akan dikunjungi dan dikontrol langsung mahasiswa di PT yang bersangkutan di seluruh Indonesia dan di Luar Negeri
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Pokja Papua Sehat BPP bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, bertempat di Gedung Otonom ruang kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Kunjungan Koordinasi ketersediaan Pusat Pelayanan Kesehatan di 40 Distrik pada 40 Unit Puskesmas. 2. Koordinasi Penanganan HIV/AIDS karena kelembagaan sudah ada bersama personal namun sebagian besar berlatar belakang non teknis kesehatan sehingga kinerja belum optimal.
Peserta Kegiatan	:	1. Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M., Anggota BPP POKJA Papua Sehat. 2. Lesman Tabuni, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya 3. Odi Haluk, S.KM. Kepala Bidang Kesehatan (Yankes) Kabupaten Jayawijaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	1. Puskesmas Standar Pengadaan Kemenkes RI bagi Distrik tanpa Puskesmas terdiri 19 Unit yang telah terbangun. 2. Puskesmas dengan bangunan setengah permanen yang harus dibangun standart sama dengan 19 Distrik adalah 10 Unit. 3. Puskesmas bangunan kecil yang diprioritaskan utama 11 Unit. 4. Dinas Kesehatan mengalami kekurangan tenaga kesehatan Dokter dan Perawat, sehingga upaya pemerintah saat ini adalah Mengirimkan 70 calon tenaga dengan Program Pendidikan D3 Keperawatan, dan lebih diprioritaskan Program Pendidikan dalam berjalan (Tugas Belajar). 5. Mendukung dgn obat-obatan dan alat timbangan/Ukur dengan penugasan personil 1 dokter dan 3 medis ukur Pustu dalam kegiatan sosialisasi. 6. Penanganan HIV/AIDS Kelembagaan sudah ada dengan personilnya, namun sebagian besar berlatar belakang non teknis kesehatan sehingga kinerja belum optimal. Maka, akan diperbaiki organisasi dan latar personil organisasi melalui bupati.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	---

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Partisipasi Pokja Papua Sehat BPP dalam rangka Sosialisasi dan Rekonsiliasi Gereja-Gereja di Kabupaten Jayawijaya.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2025, bertempat di Aula Pertemuan Sasana Wio Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mengikuti Rapat Sosialisasi Rekonsiliasi Gereja-Gereja dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan Perdamaian lahir dan batin di Kabupaten Jayawijaya.
Peserta Kegiatan	:	Dalam pertemuan sosialisasi dan rekonsiliasi PGGJ Kabupaten Jayawijaya di hadiri oleh: 1. Bupati Kabupaten Jayawijaya. 2. Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya. 3. Anggota BPP POKJA Papua Sehat. 4. SEKDA Kabupaten Jayawijaya. 5. Asisten II Kabupaten Jayawijaya. 6. Badan Pengurus Harian Persekutuan Gereja-Gereja (PGGJ) Kabupaten Jayawijaya. 7. Pemimpin Umat Kristiani dari 17 Denominasi Gereja yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	1. Kesulitan mendapatkan data akurat peristiwa, karena generasi tua sudah mendahului. 2. Tuntutan darah para martir pemberita Injil menjadi penghambat pembangunan. 3. Batas Waktu Berdoa dan Pengumpulan data oleh gereja tanggal 5 Juli 2025.

		4. Acara Doa khusus Pengampunan Dosa difasilitasi Bupati di ambang 100 hari kerja Bupati. 5. Tim Kerja berpusat di Kantor Wilayah Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII).
Dokumentasi Kegiatan	:	 

BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

**Wamena, 8 Juli 2025
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**



HANTOR MATUAN, S.IP.